



LELLY QODARIAH & DESVIAN BANDARSYAH

Penguatan Pembelajaran IPS Berdasarkan Kurikulum 2013

RESUME: Kehadiran Kurikulum 2013, di tengah proses pendewasaan pendidikan di Indonesia, sejalan dengan keberadaan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Kemudian, Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan banyak kesempatan bagi siswa untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan demi kehidupan saat ini dan masa depan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa benar-benar terjadi kesenjangan antara materi IPS yang akan diajarkan oleh guru dengan realitas masalah sosial di masyarakat, khususnya di Jakarta, telah berkembang menjadi memprihatinkan. Kemudian, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pendekatan pembelajaran IPS dapat dilakukan dengan menggunakan model yang berurutan dan terhubung. Model berurutan menyiratkan sebagai aplikasi pembelajaran untuk menyortir materi dalam kategori mempersiapkan serangkaian topik, bab, dan unit dengan menentukan prioritas mata pelajaran yang ada sebagai model pengembangan pembelajaran. Sementara itu, model terhubung menyiratkan sebagai konsep untuk menghubungkan antar-topik dan konsep IPS di sekolah. Pembelajaran IPS terpadu dari model yang diurutkan memerlukan pendekatan disiplin Ilmu-ilmu Sosial yang berbeda. Dalam konteks ini, penekanan disiplin ilmu Geografi dan Sejarah dalam pengajaran IPS, misalnya, pada topik dan konsep yang serupa muncul dengan kuat, tetapi saling melengkapi dan saling mengisi, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang berarti kepada siswa melalui proses berpikir kritis yang dilakukan oleh mereka.

KATA KUNCI: Kurikulum; Model Berurutan dan Terhubung; Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Pendekatan Belajar-Mengajar.

ABSTRACT: "Learning Reinforcement of Social Studies Based on the 2013 Curriculum". The presence of the 2013 Curriculum, amid the maturing process of education in Indonesia, is in line with the existence of Social Studies. Then, the 2013 Curriculum is expected to develop learning experiences that provide ample opportunities for students to master the competencies required for the life of the present and the future. By using the qualitative approaches, this study shows that there is absolutely a gap between the content of Social Studies to be taught by the teachers with the reality of social problems in society, particularly in Jakarta, has grown to an apprehensive level. Then, to solve that discrepancy, the Social Studies learning approaches can be performed using sequenced and connected models. Sequenced model implies as the application of learning to sort the material in the category of preparing a series of topics, chapters, and units with determining priorities of existing subjects as the development model of learning. Meanwhile, connected model implies as a concept to connect with inter-topics and concepts of the Social Studies in the school. Integrated Social Studies learning of sequenced model requires a disciplined approach of the Social Sciences that is different. In this context, the emphasis disciplines of Geography and History in teaching of Social Studies, for example, on the similar topic and the concept appears strongly, but mutually and complementary, so it can provide meaningful knowledge to the students through the process of critical thinking that is done by them.

KEY WORD: Curriculum; Sequenced and Connected Models; Social Studies Education; Teaching and Learning Approach.

About the Authors: Dr. Lelly Qodariah and Dr. Desvian Bandarsyah are the Lecturers at the FKIP UHAMKA (Faculty of Education and Teacher Training, Muhammadiyah University of Prof. Dr. HAMKA [Haji Abdul Malik Karim Amrullah]) Jakarta, B Campus, Jalan Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, Ciracas. Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830, Jakarta, Indonesia. Corresponding authors: lelly_uhamka@yahoo.co.id and d.bandarsyah@gmail.com

Suggested Citation: Qodariah, Lelly & Desvian Bandarsyah. (2018). "Penguatan Pembelajaran IPS Berdasarkan Kurikulum 2013" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Volume 11(2), November, pp.187-196. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI with ISSN 1979-0112 (print) and ISSN 2622-6855 (online).

Article Timeline: Accepted (April 1, 2018); Revised (July 3, 2018); and Published (November 30, 2018).

PENDAHULUAN

Tugas yang sangat penting dalam proses pembelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) di sekolah adalah mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang mampu berperan aktif dalam masyarakat. Tugas ini menjadi sangat kompleks mengingat bahwa IPS merupakan salah satu kajian yang banyak mendapat sorotan ahli pendidikan sebagai mata pelajaran yang dapat mengambil peranan didalam mempersiapkan siswa agar mereka dapat memasuki masyarakat demokratis dengan pengalaman akademik dan ketrampilan sosial yang memadai, sehingga mereka tidak gagap ketika terjun di masyarakat (Daldjoeni, 1992; Sapriya *et al.*, 2008; dan Ratnawati, 2016). Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS dalam Kurikulum 2013, yakni:

[...] untuk menghasilkan warganegara yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat dan bangsanya, religius, jujur, demokratis, kreatif, analitis, senang membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan sosial-budaya, serta berkomunikasi secara produktif (Kemdikbud RI, 2013).

Namun demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lelly Qodariah *et al.* (2011) menyimpulkan bahwa hal yang sangat kontras dengan tugas yang diemban oleh pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) adalah kemampuan dan kesiapan guru IPS di sekolah dalam menjalankan dan mencapai tugas tersebut. Meskipun kemampuan guru IPS terkait dengan pemahaman konsep filosofis tentang pembelajaran IPS secara harfiah dimiliki dengan baik oleh para guru, namun pada tataran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran masih terdapat problema dan tantangan yang dihadapi oleh pembelajaran IPS, terutama, tantangan itu berupa praktek pembelajaran IPS yang konvensional. Belum semua guru pada wilayah sampel dapat membelajarkan IPS yang berpusat pada siswa, dalam konteks kekinian, dan mencoba memberikan keterampilan dalam

memprediksi tantangan masa depan (Qodariah *et al.*, 2011).

Kesimpulan lainnya, guru-guru dalam kelompok penelitian, pada umumnya, kesulitan dalam membuat perencanaan pembelajaran yang berbasis kontekstual dengan alasan klasik, antara lain, kekurangan waktu; padatnya aktivitas kelas; siswa terbiasa diberi dan menunggu penjelasan dari guru; siswa malas membaca; kurangnya sarana prasarana dan alat pengajaran IPS; tingkat pemahaman siswa yang beragam; sulitnya menanamkan pemahaman akan simbol-simbol pada peta; ruang lingkup pelajaran sangat luas sehingga siswa sulit memahaminya; kurikulum yang sering kali berubah-ubah; fenomena alam yang sulit di prediksi; serta hal lainnya karena guru belum siap menghadapi siswa kritis dan terbawa pada pola pembelajaran *teacher centered* (Hamalik, 2003; Sapriya *et al.*, 2008; dan Qodariah *et al.*, 2011).

Mencermati pendapat Ahmad Syahroni (2010), seorang pemerhati pemuda, yang menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan remaja belakangan ini, seperti pelemparan air keras, pembajakan bus, dan sebagainya. Ahmad Syahroni (2010) memotret data dari Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta bahwa, pada 2009, terdapat 0.08 persen atau 1,318 dari 1,647,835 siswa SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) di DKI Jakarta terlibat tawuran; dan angka ini meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan (Syahroni, 2010).

Selanjutnya, dalam laman yang sama, Ahmad Syahroni (2010) menilai bahwa eskalasi "agresivitas" remaja belakangan ini sebenarnya "alamiah" dilakukan oleh remaja, mengingat remaja memiliki karakter yang labil, egois, dan mengedepankan kesenangan di atas tindakan produktif dan positif (Syahroni, 2010). Ini yang kemudian sesuai dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa remaja merupakan fase paling berbahaya dalam kehidupan seseorang. Sebanyak 65% remaja memiliki masalah

di keluarga, seperti masalah keuangan, masalah perceraian orang tua, dan anggota keluarga meninggal (Kartono, 2008; Syahroni, 2010; dan Unayah & Sabarisman, 2015).

Dalam konteks ini, seharusnya sekolah dan pemerintah memberikan "ruang" bagi remaja untuk menyalurkan energi tersebut di kegiatan-kegiatan yang positif. Berbagai data tersebut menggambarkan bahwa pembelajaran IPS belum memberikan kontribusi maksimal dalam menekan laju pertumbuhan perilaku negatif remaja sebagai anak didik yang belajar IPS di sekolah (Daldjoeni, 1992; Sapriya *et al.*, 2008; dan Rahmad, 2016).

Persoalan ini tentu memiliki kesenjangan antara teori tertulis dengan realitas di lapangan karena, dengan mengutip pendapat Nursid Sumaatmadja (2007), bahwa tujuan pendidikan IPS adalah untuk membina anak didik menjadi warganegara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negara (Sumaatmadja, 2007:10). Untuk merealisasikan tujuan tersebut, proses pembelajaran IPS tidak boleh sekedar menyentuh aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) semata, melainkan harus menyentuh aspek ahlak (afektif), sehingga anak didik dapat memahami dan menghayati serta menyadari kehidupan yang kompleks dan penuh masalah, tantangan, hambatan, dan persaingan di dunia ini (Hamalik, 2003; Sudihardjo, 2004; dan Sumaatmadja, 2007).

Hal ini juga sejalan dengan apa dikatakan oleh T. Fallace (2010) tentang orientasi pendidikan IPS, sebagai berikut:

Three orientations to the Social Studies: (1) the traditional strand centers on the transmission of cultural knowledge in the form of specific information; (2) the disciplinary strand centers on developing the skills, understandings, and processes of disciplinary expert; and (3) the progressive strand center on interdisciplinary exploration of them and issues related directly to citizenship (Fallace, 2010:24).

Pendapat tersebut menjelaskan tentang adanya tiga orientasi kajian dalam IPS

(Ilmu Pengetahuan Sosial), yaitu: sebagai pusat transmisi pengetahuan budaya; sebagai pusat pengembangan keterampilan, pemahaman, dan sikap kedisiplinan; serta sebagai pusat eksplorasi interdisipliner tentang tema dan isu-isu yang terkait langsung dengan kewarganegaraan (*cf* Somantri, 2001; Fallace, 2010; dan Ahmadi & Amri, 2011).

Kesenjangan antara konten IPS yang harus diajarkan dengan realitas persoalan sosial pada masyarakat, khususnya di Jakarta, telah berkembang hingga tingkat yang sangat memprihatinkan. Untuk itu menjadi sangat penting dan mendesak jika guru-guru IPS di sekolah mitra diberikan IbM (IPTEK [Ilmu Pengetahuan dan Teknomolgi] bagi Masyarakat) penguatan pembelajaran IPS berdasarkan Kurikulum 2013, agar proses pembelajaran IPS di sekolah dapat dilaksanakan dengan baik dan bermakna (*cf* Qodariah *et al.*, 2011; Khilmiyah & Samsudin, 2016; dan Purnomo, Muntholib & Amin, 2016).

Artikel ini, dengan menggunakan pendekatan dan metode kualitatif yang bersifat analisis-deskriptif (Creswell, 1994; Sukmadinata, 2005; dan Mulyadi, 2010 dan 2011), akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS yang baik dan bermakna dalam kaitannya dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu tentang Kurikulum 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum 2013. Pemerintah, melalui Kemendiknas RI (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia), pada tahun 2013, menetapkan perubahan Kurikulum. Sebagian landasan perubahan terdapat pada aspek filosofis, bahwa Kurikulum 2013 berlandaskan aspek filosofis yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kurikulum 2013 juga berorientasi pada pengembangan kompetensi (Ahmadi, 2013; Widayastono, 2014; dan Muhammedi, 2016).

Pada aspek yuridis, terkait dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), 2010–2014, pada sektor pendidikan terdapat perubahan

tentang metodologi pembelajaran dan terdapat pula penataan kurikulum. Hal lain, merujuk kepada INPRES (Instruksi Presiden) No.1 Tahun 2010, yakni percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, diantaranya penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa (Chaniago, 2015).

Pada aspek konseptual, pengembangan kurikulum terjadi pada relevansi, model kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum lebih dari sekedar dokumen, proses pembelajaran pada aktivitas belajar, *output* belajar, *outcome* belajar, dan terakhir pada aspek penilaian, yakni kesesuaian antara teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian (Hamalik, 2008; Sukmadinata, 2012; dan Muhammedi, 2016).

Aspek lain, yang menjadi perhatian pada Kurikulum 2013, terdapat pada KI (Kompetensi Inti) yang harus dikuasai siswa, dan diajar serta dilatih oleh guru, yakni: KI-1 sikap spiritual, yaitu sikap positif terhadap Tuhan Yang Maha Esa; KI-2 sikap sosial, yaitu sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dimana kedua kompetensi itu merupakan kompetensi yang mengembangkan nilai-nilai karakter peserta didik; KI-3 pengetahuan; dan KI-4 keterampilan (Widyastono, 2014; Harahap, 2015; dan Muhammedi, 2016).

Ketika guru mengajar di kelas menjelaskan suatu materi, maka pengetahuan dalam KI-3 dan keterampilan dalam KI-4 menjadi landasan dalam memberikan ilmu/pengetahuan dan keterampilan; sedangkan nilai-nilai spiritual dalam KI-1 dan sikap sosial dalam KI-2 yang harus mendukung dan menjiwai ketercapaian pengetahuan dan keterampilan tersebut, sehingga pengetahuan anak didik menjadi memiliki makna bagi dirinya dan kehidupannya serta lingkungan masyarakat dimana anak didik hidup (Harahap, 2015; dan Muhammedi, 2016).

Perubahan lain terdapat pada sistem pembelajaran, khususnya pada Kegiatan

Inti dan Evaluasi. Pada Kegiatan Inti, pembelajaran harus memanfaatkan pendekatan *scientific approach*, yakni kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi atau mengolah, dan mengkomunikasikan atau menyaji. Dalam kegiatan belajar, pendekatan tersebut harus diolah oleh guru; guru tidak harus terpaku dengan kata-kata kunci tersebut, namun dapat dikembangkan menjadi kegiatan mengamati dengan kata operasional: membaca, mendengar, menyimak, dan seterusnya. Sedangkan untuk menanya dapat juga dengan kata operasional: berdiskusi. Untuk kata kunci mencoba dapat dikembangkan dengan mengumpulkan informasi dan eksperimen; mengolah informasi menjadi mengasosiasi dan menganalisis; menyaji dapat dikembangkan dengan indikator mengkomunikasikan, melaporkan, dan sebagainya (Harahap, 2015; Winarso, 2015; dan Muhammedi, 2016).

Sistem penilaian pada Kurikulum 2013 dilakukan oleh 4 komponen, yakni: siswa sendiri, guru, sekolah, dan pemerintah. Untuk anak didik harus mampu mengukur seberapa banyak pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Hal ini dilakukan sebelum anak didik masuk pada kondisi ulangan harian. Penilaian oleh guru dilakukan dengan penilaian otentik, penilaian yang terus-menerus dilakukan (Kurniasih & Sani, 2014; Fathurrohman, 2015; dan Winarso, 2015).

Penilaian otentik (*authentic assessment*) adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah "otentik" sendiri merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel. Secara konseptual, penilaian otentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekali pun. Ketika menerapkan penilaian otentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, serta nilai prestasi luar sekolah (Kurniasih

& Sani, 2014; Fathurrohman, 2015; dan Muhammedi, 2016).

Pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) menjadi sangat penting mengingat tantangan kemerosotan moral generasi muda yang semakin mengkhawatirkan. Untuk itu, pembelajaran IPS harus dapat mendorong generasi muda memiliki perspektif sosial yang baik, serta untuk membentuk karakter dan kepribadian anak didik agar mereka memiliki karakter dan kepribadian yang mandiri, sehingga menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik (Sapriya, 2009; Somantri, 2001; dan Kemdikbud RI, 2013).

Ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Fenton (1967), bahwa "*Social studies prepare children to be good citizenship; social studies teach children how to think; and social studies pass on the culture heritage*" (Fenton, 1967:149). Berdasarkan pendapat tersebut maka pendidikan IPS bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mampu berpikir kritis untuk memecahkan masalah sosial serta dapat mewarisi budaya, sehingga memiliki jati diri yang sesuai dengan nilai budaya bangsa (*cf* Fenton, 1967; Daldjoeni, 1992; dan Rahmad, 2016).

Pendidikan IPS merupakan ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Materi ajar berbagai cabang pengetahuan dalam IPS diajarkan sebagai suatu kesatuan sistemik yang satu dengan yang lainnya memiliki saling keterkaitan, baik secara bersama-sama maupun secara terpadu (Somantri, 2001; Rahmad, 2016; dan Kemdikbud RI, 2013). Dalam konteks ini, A. Kosasih Djahiri (1980) mengatakan bahwa faktor pendekatan pembelajaran dengan pendekatan multi disiplin dan secara terpadu inilah yang menentukan menjadi identitas dan karakteristik IPS (Djahiri, 1980:7).

Mengajarkan IPS harus dilakukan dengan prinsip belajar modern, yang melibatkan dan menempatkan faktor guru hanya sebagai salah satu sumber belajar, bukan satu-satunya sumber belajar. Dengan demikian, pembelajaran IPS perlu

mengedepankan prinsip pembelajaran yang demokratis (Somantri, 2001; Sapriya, 2009; dan Kemdikbud RI, 2013). Prinsip utama pengembangan pembelajaran IPS perlu juga mengedepankan: *learning to know* atau belajar untuk mengetahui; *learning to do* atau belajar untuk melakukan; *learnig to be* atau belajar untuk menjadi; serta *learning to live together* atau belajar untuk hidup bersama (Maulana, 2010; dan Kemdikbud RI, 2013).

Pembelajaran IPS harus dimulai dari apa yang diketahui siswa mengenai fakta dan konsep. Proses pembelajaran IPS dilandasi oleh nilai-nilai demokratis, yang memberikan kebebasan untuk menilai, memahami, dan memilih nilai yang dianggap benar; dan yang dibutuhkan dalam kehidupan, proses lain harus adil, harus berlandaskan pada persamaan, dan kerjasama. Pembelajaran IPS harus berupaya untuk membuat siswa mau belajar, maka pendekatan yang bersifat partisipatoris akan mampu mentransfer dan mengembangkan nilai-nilai (Djahiri, 1980; Somantri, 2001; Sapriya, 2009; dan Kemdikbud RI, 2013).

Pembelajaran IPS tidak harus belajar di ruang kelas, tetapi dapat dikembangkan belajar di luar kelas. Hal ini tentu akan lebih mengenal dan memahami potensi siswa melalui pendekatan yang bersifat psiko-sosial-kultural, apalagi dalam proses pembelajaran juga dikembangkan aspek media dan evaluasi dalam menopang pencapaian hasil belajar yang optimal (Daldjoeni, 1992; Sapriya, 2009; dan Rahmad, 2016).

Proses transfer nilai, sikap, dan keterampilan melalui pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai materi ajar, metode, media, dan teknik pembelajaran. Penilaian lebih diutamakan pada proses pembelajaran. Model pembelajaran perilaku bertujuan untuk membangun dan memperbaiki perilaku. Dasar pemikiran model ini adalah adanya keyakinan bahwa setiap siswa mampu mengoreksi diri, mengendalikan diri, dan memperbaiki perilakunya (Maryani & Yani, 2014:117). Dengan demikian, maka nilai, sikap, dan

perilaku siswa dapat berkembang dengan baik, yang mengarah kepada penghormatan terhadap diri, orang lain, dan lingkungan sosialnya (Djahiri, 1980; Somantri, 2001; Sapriya, 2009; Kemdikbud RI, 2013; dan Maryani & Yani, 2014).

Salah satu model yang jarang dikembangkan oleh guru di sekolah dalam pembelajaran IPS adalah model *sequenced* dan *connected*. Padahal kedua pendekatan ini dapat mengakomodasikan materi IPS yang kompleks dan luas, serta sesuai dengan karakter materi IPS yang berangkat dari perpaduan atau integrasi berbagai disiplin bidang ilmu ilmu sosial, seperti: sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan geografi (Daldjoeni, 1992; Somantri, 2001; dan Depdiknas RI, 2006).

Pendekatan IPS terpadu disajikan menurut metode berpikir para ilmuwan sosial, karena IPS berasal dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, guna memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang kompleks dalam kehidupan. Keterpaduan itu dimaksudkan untuk memberikan sudut pandang yang holistik kepada anak didik dalam memahami, mencari solusi, dan melakukan aksi dalam mengatasi persoalan yang kompleks (Bandarsyah, 2014:123). Hanya dengan pendekatan semacam ini, maka diyakini bahwa pembelajaran IPS menjadi sarat makna dan memberikan ruang besar bagi pengembangan pemahaman siswa terhadap dirinya di tengah-tengah kompleksitas kehidupan (Somantri, 2001; Sapriya, 2009; dan Bandarsyah, 2014).

Jika dibandingkan dalam konsep konvensional, maka pembelajaran IPS dengan pendekatan baru ini lebih menekankan keterlibatan peserta didik dalam belajar, sehingga peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran untuk pembuatan keputusan. Setiap peserta didik memerlukan bekal pengetahuan dan kecakapan agar dapat hidup di masyarakat; dan bekal ini diharapkan diperoleh melalui pengalaman belajar di sekolah. Oleh karena itu, pengalaman belajar di sekolah sedapat mungkin memberikan bekal kepada peserta didik dalam mencapai kecakapan

untuk berkarya. Kecakapan ini disebut "kecakapan hidup", yang cakupannya lebih luas dibanding hanya sekedar keterampilan (Depdiknas RI, 2006; Ahmadi & Amri, 2011; dan Ahmadi, 2013).

Pembelajaran IPS terpadu dilakukan dengan menggunakan model *sequenced* dan *connected*. Model *sequenced* mengandung pengertian sebagai penerapan pembelajaran dengan mengurutkan materi dalam kategori menyusun rangkaian topik, bab, dan unit dengan menentukan skala prioritas mata pelajaran yang ada sebagai model pengembangan pembelajaran (Fogarty, 1991:35). Model ini memungkinkan guru dapat mengambil keputusan untuk diterapkan di luar sistematis urutan materi dalam kurikulum. Pendekatan ini juga membantu siswa untuk memahami materi dalam mata pelajaran yang telah diajarkan (Fogarty, 1991; Depdiknas RI, 2006; Ahmadi & Amri, 2011; dan Trianto, 2011).

Sedangkan model *connected* mengandung pengertian sebagai menghubungkan suatu konsep yang dipertautkan dengan antar topik dan dengan konsep dalam mata pelajaran IPS di sekolah. Pembelajaran terpadu model *connected*, menurut Robin Fogarty (1991), mengandung pengertian sebagai keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antar topik, keterkaitan antar konsep, keterkaitan antar keterampilan, mengaitkan tugas pada hari ini dengan selanjutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi (*cf* Fogarty, 1991; Depdiknas RI, 2006; Ahmadi & Amri, 2011; dan Trianto, 2011).

Pada pembelajaran IPS dengan model ini, kunci utamanya adalah adanya satu usaha sadar untuk menghubungkan bidang kajian dalam satu disiplin ilmu.

Bila kita memandang model *connected*, rincian dari satu disiplin ilmu terfokus kepada bagian-bagian yang sebenarnya saling berhubungan, sehingga akan terjadi pola hubungan serangkaian materi satu yang menjadi prasarat materi berikutnya, atau satu materi mendukung materi

berikutnya. Apa yang dipelajari menjadikan proses pembelajaran bermakna dengan menghasilkan perspektif pemahaman yang utuh bagi siswa, sebagaimana tuntutan dari pendidikan IPS yang mengandung nilai-nilai bagi kehidupan. Sebagai catatan bahwa kaitan antar konsep, topik, atau tema itu terjadi hanya pada satu mata pelajaran IPS di sekolah, sehingga hal ini memudahkan guru untuk mempersiapkan proses pembelajaran dengan lebih baik (Somantri, 2001; Depdiknas RI, 2006; dan Sapriya, 2009).

Misalnya, materi IPS untuk pokok bahasan mengenai "Keadaan Alam Indonesia" bisa diurutkan dengan materi "Kehidupan pada Masa Pra-Aksara". Dua pokok bahasan dengan pendekatan *sequenced* akan memudahkan siswa menerima materi yang dijelaskan oleh guru, memberikan penguatan terhadap materi yang disampaikan, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal ini dimungkinkan karena beberapa topik dalam pembelajaran IPS diorganisasikan kembali dan diurutkan agar dapat bertepatan atau serupa. Dengan demikian, guru dapat menyampaikan pembelajaran IPS pada materi yang berbeda secara berurutan (Atmadja, 1992; Sudihardjo, 2004; dan Depdiknas RI, 2007).

Pembelajaran IPS terpadu model *sequenced* mensyaratkan pendekatan disiplin ilmu-ilmu sosial yang berbeda. Dalam contoh di atas, penekanan disiplin ilmu geografi dan ilmu sejarah dalam pembelajaran IPS dengan topik dan konsepnya nampak dengan kuat, tetapi saling mengisi dan melengkapi sehingga memberikan pengetahuan yang bermakna kepada anak didik melalui proses berpikir kritis yang dilakukan oleh mereka (Depdiknas RI, 2006; Ahmadi & Amri, 2011; dan Trianto, 2011).

Pada gilirannya, pembelajaran IPS yang dilakukan dengan model pendekatan yang tepat akan menghasilkan kualitas pemahaman yang baik pada anak didik; dan dalam jangka panjang akan mendorong lahirnya sikap sosial positif dari siswa terhadap dirinya dan lingkungan sosialnya.

Dalam konteks ini, segala kompleksitas kehidupan yang disebabkan oleh kemunduran moralitas sosial generasi muda bangsa Indonesia dapat diurai dan diselesaikan dengan baik, sistematis, dan komprehensif (Somantri, 2001; Sudihardjo, 2004; dan Depdiknas RI, 2007).

Pembelajaran IPS harus memberikan kontribusi positif bagi pengembangan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, sehingga muncul tatanan sosial dalam masyarakat yang baik dan beradab, dengan mengedepankan nilai-nilai toleran, kebersamaan, solidaritas, kesetiakawanan, dan nilai-nilai lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan (Depdiknas RI, 2007; Sapriya, 2009; dan Ratnawati, 2016).

KESIMPULAN

Perkembangan sosial dalam masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk masyarakat Indonesia, menuntut adanya pendidikan dan pengajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) yang perlu dilakukan dengan pendekatan baru. Pembelajaran IPS di sekolah harus dilakukan dengan prinsip belajar modern, yang melibatkan dan menempatkan guru menjadi bukan satu-satunya sumber belajar. Dengan demikian, pembelajaran IPS perlu mengedepankan prinsip pembelajaran yang demokratis.

Prinsip utama pengembangan pembelajaran IPS perlu mengedepankan: *learning to know* atau belajar untuk mengetahui; *learning to do* atau belajar untuk melakukan; *learnig to be* atau belajar untuk menjadi; serta *learning to live together* atau belajar untuk hidup bersama. Karena pada akhirnya, pembelajaran IPS kepada anak didik bertujuan untuk membekali mereka dengan sikap, nilai, dan ketrampilan untuk hidup bersama dalam masyarakatnya.

Pembelajaran IPS di sekolah membutuhkan pendekatan yang tepat sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi sosial anak didik agar dapat menjalani kehidupan sosialnya dengan baik. Salah pilihan yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan mengedepankan pendekatan *sequenced* dan *conntected*. Dua

model pendekatan ini, dengan karakter yang dimilikinya, menjadikan antar materi, antar topik, dan antar konsep dalam pembelajaran IPS dapat saling mendekati dan terhubung dengan realitasnya yang penuh makna.¹

Referensi

- Ahmadi. (2013). *Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Ahmadi, Iif Khoiru & Sofan Amri. (2011). *Mengembangkan Pembelajaran IPS Terpadu*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Atmadja, Negah Bawa. (1992). "Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial: Implikasinya dalam Pendidikan Sejarah" dalam *Aneka Widya*. Singaraja, Bali: FKIP UNUD [Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Udayana].
- Bandarsyah, Desvian. (2014). "Pengembangan Pendekatan Hermeneutika dalam Pembelajaran Sejarah: Studi Fenomenologi pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Bandung: SPs UPI [Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Chaniago, Andrinof A. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I: Agenda Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tersedia secara online juga di: <https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF> [diakses di Jakarta, Indonesia: 1 Juni 2018].
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications, second edition.
- Daldjoeni, N. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2006). *Panduan Pengembangan Pembelajaran IPS Terpadu*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2007). *Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat, Departemen Pendidikan Nasional.
- Djahiri, A. Kosasih. (1980). *Pendekatan dan Teknik Pengembangan Materi dan Program Pengajaran IPS*. Jakarta: Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Fallace, T. (2010). "Exploring Three Orientations to the Social Studies" in E.E. Heilman [ed]. *Social Studies and Diversity Education: What We Do and Why We Do it*. New York: Routledge, pp.23-25.
- Fathurrohman, Muhammad. (2015). *Paradigma Pembelajaran Kurikulum 2013: Strategi Alternatif Pembelajaran di Era Global*. Sleman, Yogyakarta: Penerbit Kalimedia.
- Fenton. (1967). *Teaching the New Social Studies in Secondary School*. Bloomington: Indiana University Press.
- Fogarty, Robin. (1991). *How to Integrate the Curricula*. Illionis: IRI/Skylight Publishing, Inc.
- Hamalik, Oemar. (2003). *Pendidikan Guru*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamalik, Oemar. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, M. Nawi. (2015). "Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum 2013" dalam *KOMPASIANA: Beyond Blogging*. Jakarta: 11 Agustus. Tersedia secara online juga di: <https://www.kompasiana.com/mnawiharahap/55b86a3c92fd220738f918/kompetensi-inti-dan-kompetensi-dasar-dalam-kurikulum-2013> [diakses di Jakarta, Indonesia: 22 Juni 2018].
- Kartono, Kartini. (2008). *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kemdikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (2013). *Ilmu Pengetahuan Sosial: Buku Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Khilmayah, Akif & Muhammad Samsudin. (2016). "IbM untuk Revolusi Mental Guru PAI Sekolah Dasar Kabupaten Bantul dalam Penerapan Social Emotional Learning (SEL) sebagai Upaya Penguatan Karakter Siswa". *Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Kopertis Wilayah V DIY. Tersedia secara online juga di: <http://docplayer.info/52813014-Laporan-akhir-ipteks-bagi-masyarakat-ibm.html> [diakses di Jakarta, Indonesia: 1 Juni 2018].
- Kurniasih, Imas & Berlin Sani. (2014). *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013: Memahami Berbagai Aspek dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: Kata Pena.
- Maryani, Enok & Ahmad Yani. (2014). "Kearifan Lokal Masyarakat Sunda dalam Memitigasi Bencana dan Aplikasinya sebagai Sumber Pembelajaran IPS Berbasis Nilai" dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan UPI Bandung*, Vol.14, No.2 [Oktober].
- Maulana, Dayan. (2010). "Empat Pilar Pendidikan Menurut UNESCO". Tersedia secara online di: <http://dayanmaulana.blogspot.com/2010/06/empat-pilar-pendidikan-menurut-unesco.html> [diakses di Jakarta, Indonesia: 22 Juni 2018].
- Muhammedi. (2016). "Perubahan Kurikulum di Indonesia: Studi Kritis tentang Upaya

- Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal” dalam *RAUDHAAH*, Vol.IV, No.1 [Januari – Juni], hlm.49-70.
- Mulyadi, Mohammad. (2010). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Mulyadi, Mohammad. (2011). “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya” dalam *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol.15, No.1 [Januari – Juni]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/134513-ID-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif-se.pdf> [diakses di Jakarta, Indonesia: 1 Juni 2018].
- Purnomo, Arif, Abdul Muntholib & Syaiful Amin. (2016). “Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Materi Kontroversi (*Controversy Issues*) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Semarang” dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol.33, No.1. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/124610-ID-model-pembelajaran-ilmu-pengetahuan-sosi.pdf> [diakses di Jakarta, Indonesia: 1 Juni 2018].
- Qodariah, Lelly *et al.* (2011). “Profil Pembelajaran IPS di Jenjang Pendidikan Dasar Berstandar Nasional di Wilayah Jakarta Barat” dalam *Prosiding Transformasi Pendidikan Ilmu Sosial dalam Rangka Penguatan Jatidiri Karakter Bangsa*. Jakarta: UHAMKA [Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA] Press.
- Rahmad. (2016). “Kedudukan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Sekolah Dasar” dalam *MUALLIMUNA: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, Vol.2, No.1 [Oktober]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/222455-kedudukan-ilmu-pengetahuan-sosial-ips-pa.pdf> [diakses di Jakarta, Indonesia: 1 Juni 2018].
- Ratnawati, ETTY. (2016). “Pentingnya Pembelajaran IPS Terpadu”. *Makalah Tidak Diterbitkan*, tersedia pada penulis.
- Sapriya. (2009). *Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: Rosda Karya.
- Sapriya *et al.* (2008). *Konsep Dasar IPS*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Somantri, Muhammad Numan. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudihardjo. (2004). *Pengembangan Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)*. Yogyakarta: Penerbit PPs UNY [Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta].
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2012). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumaatmadja, Nursid. (2007). *Perspektif Studi Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, edisi revisi.
- Syahroni, Ahmad. (2010). “60 Persen Remaja Terpapar Kekerasan”. Tersedia secara online di: <http://lampost.co/berita/60-persen-remaja-terpapar-kekerasan> [diakses di Jakarta, Indonesia: 1 Juni 2018].
- Trianto. (2011). *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Unayah, Nunung & Muslim Sabarisman. (2015). “Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas” dalam *Sosio Informa*, Vol.1, No.2 [Mei – Agustus]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/52810-ID-fenomena-kenakalan-remaja-dan-kriminalit.pdf> [diakses di Jakarta, Indonesia: 1 Juni 2018].
- Widyastono, Herry. (2014). “Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013”. *Makalah* disajikan dan didiskusikan dalam Seminar FKIP UHAMKA [Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA] di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 3 Mei.
- Winarso, Widodo. (2015). *Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Cirebon: t.p. [tanpa penerbit]. Tersedia secara online juga di: https://www.researchgate.net/profile/Widodo_Winarso/publication/317183165_Dasar_Pengembangan_Kurikulum_Sekolah [diakses di Jakarta, Indonesia: 22 Juni 2018].



Proses Belajar-Mengajar IPS di Sekolah
(Sumber: <http://pd.pps.uny.ac.id/berita>, 22/6/2018)

Pembelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) di sekolah membutuhkan pendekatan yang tepat sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi sosial anak didik agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Salah pilihan yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan mengedepankan pendekatan *sequenced* dan *connected*. Dua model pendekatan ini, dengan karakter yang dimilikinya, menjadikan antar materi, antar topik, dan antar konsep dalam pembelajaran IPS dapat saling mendekati dan terhubung dengan realitasnya yang penuh makna.